KOLABORASI PERGURUAN TINGGI DALAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Lusi Dwi Putri ; Fadrizal Lubis; Fitridawati Soehardi
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning
Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai – Pekanbaru
dwiputrilusi@gmail.com

ABSTRAK

Tahun 2015-2016 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Dami belum termasuk kawasan prioritas mendapat sumber pendanaan dari pusat, sementara masih banyak infrastruktur permukiman yang perlu pembenahan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan UU No 17/2007 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dan UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta didorong oleh amanat internasional seperti MDG'S, SDG'S, agenda Habitat dan Rio serta isu nasional tentang permukiman kumuh maka perlu menciptakan Permukiman yang Layak huni dan Berkelanjutan. Tahun 2015-2019 prioritas kegiatan perbaikan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah konsep penanganan kawasan kumuh, dengan keterbatasan kemampuan pendanaan untuk hal tersebut dirasa perlu adanya aspirasi daerah, masyarakat dan perguruan tinggi untuk mewujudkannya. Perbaikan infrastruktur permukiman bersumber dari dana APBN, APBD, CSR, dana aspirasi, kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun swadaya masyarakat. Bertitik tolak pada kondisi tersebut maka perlu bagi kalangan akademisi untuk mengidentifikasi kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat di lingkungannya dalam memanfaatkan sumber dana tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data sekunder menggunakan metode survey langsung, studi literatur, kuisioner dan FGD yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat dalam membuat perencanaan teknis infrastruktur di permukiman, membantu masyarakat dalam membuat perencanaan, meningkatkan peran serta masyarakat untuk membangun kultur pembelajaran yang terorganisasi melalui komunitas belajar secara berkelanjutan dan dapat menggalang kemitraan dengan pihak luar.

Hasil yang diperoleh adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang perencanaan teknis infrastruktur, dari 20 (dua puluh) orang peserta dengan nilai 'Sangat Baik' 5%, nilai 'Baik' 75% nilai 'Sedang' 20% dan nilai 'Tidak Tampil' 0%. Masyarakat juga perlu bimbingan dalam membuat dokumen usulan kegiatan infrastruktur. Kesimpulan yang diperoleh adalah perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan teknis infrastruktur permukiman dan perlunya membangun kultur pembelajaran yang terorganisasi melalui komunitas belajar secara berkelanjutan.

Kata kunci : perencanaan teknis, infrastruktur, masyarakat.

LATAR BELAKANG

Pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah, sehingga daya dukung sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman yang buruk, tidak sehat dan kumuh sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Fenomena tersebut dapat dipetik pelajaran bahwa pengembangan lingkungan permukiman tidak dapat dilaksanakan secara sepihak, tetapi harus secara sinergis melibatkan potensi dan eksistensi dari seluruh pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, dimana dari pihak pemerintah meliputi Pusat, propinsi, maupun kabupaten. Sedangkan dari pihak masyarakat meliputi masyarakat sendiri selaku penerima manfaat, para pelaku usaha, maupun pelaku kunci lainnya seperti

Kelompok Swadaya Masyarakat (berbasis komunitas).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan UU No 17/2007 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dan UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta didorong oleh amanat internasional seperti MDG'S, SDG'S, agenda Habitat dan Rio serta isu nasional tentang permukiman kumuh maka perlu menciptakan Permukiman yang Layak huni dan Berkelanjutan. Tahun 2015-2019 prioritas kegiatan perbaikan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah konsep penanganan kawasan kumuh, dengan keterbatasan kemampuan pendanaan untuk hal tersebut dirasa perlu adanya aspirasi daerah, masyarakat dan perguruan tinggi untuk mewujudkannya. Perbaikan infrastruktur permukiman bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), *Corporate Social Responsibility* (CSR)/tanggungjawab sosial perusahaan, dana aspirasi, kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun swadaya masyarakat.

Kelurahan Maharatu termasuk salah satu permukiman yang masih perlu dilakukan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, gorong-gorong dan sebagainya namun masih menjadi persoalan untuk mewujudkannya. Berbagai kebijakan program pemerintah fokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat dilevel RT/RW masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program yang ada di tingkat kelurahan, selain itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program pemerintah dan perusahaan swasta melalui CSR-nya. Untuk tahun 2015-2019 Kelurahan Maharatu belum termasuk kepada kawasan prioritas mendapat sumber pendanaan dari pusat (www.p2kp.org, 2015).

Bertitik tolak pada kondisi tersebut maka perlu bagi kalangan akademisi untuk mengidentifikasi kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat di lingkungannya dalam memanfaatkan sumber dana tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data sekunder menggunakan metode survey langsung yaitu untuk mendapatkan profil kelurahan, studi literatur mengenai konsep penanganan kawasan kumuh, kuisioner dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Cara Analisis data

Data-data yang diperoleh dari survey di lapangan dan dari hasil FGD dengan masyarakat kemudian dijadikan acuan untuk memberikan penguatan kapasitas di bidang infrastruktur. Dari hasil penguatan kapasitas tersebut dianalisa sampai dimana kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di lingkungannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Profil kelurahan

Profil permukiman Kelurahan Maharatu dengan nilai di bawah 80% untuk kriteria fisik adalah pada indikator aksesibilitas lingkungan yaitu sebesar 59% kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman yang memiliki kualitas minimum memadai, saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang terpisah dengan drainase lingkungan hanya sebesar 14%. Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran sebesar 11%. Untuk kriteria non fisik adalah mata pencaharian penduduk 65% perdagangan/jasa, penggunaan daya listrik 900 watt sebesar 56%, fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 41% di puskesmas/pustu.

b. Hasil FGD

Permasalahan yang disepakati untuk diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan intern (hasil diskusi dengan masyarakat, 2016)

- Masyarakat dilevel RT/RW masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program yang ada di tingkat kelurahan. Masih banyak usulan prioritas kegiatan dari level RT/RW yang belum bisa direalisasikan padahal sudah masuk dalam Musrenbang, bahkan ada yang sudah berpuluh tahun diajukan.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap berbagai program perbaikan infrastruktur baik bersumber dari dana pemerintah maupun dari perusahaan swasta melalui CSR.

2. Permasalahan ekstern (www.p2kp.org, 2015)

- Tahun 2015-2019 ini Kelurahan Maharatu belum termasuk kepada kawasan prioritas mendapat sumber pendanaan dari pusat.
- Masih banyak infrastruktur permukiman yang perlu dilakukan pembenahan

Solusi yang ditawarkan dari kalangan akademisi kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan tentang infrastruktur yang ada di kelurahan melalui kegiatan pelatihan menggunakan data profil kelurahan hasil survey.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai program perbaikan infrastruktur baik bersumber dari dana pemerintah maupun dari perusahaan swasta melalui CSR-nya, melalui kegiatan pelatihan.
3. Melaksanakan FGD kepada masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki serta memberikan pendekatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) yang baik dan benar terhadap prasarana yang ada di lingkungan permukiman.
4. Memberikan keterampilan atau *skill* melalui kegiatan *On The Job Training (OJT)* untuk dapat membuat usulan kegiatan infrastruktur permukiman

c. Penguatan Kapasitas

1. Tempat dan Waktu Pelatihan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Gedung Serbaguna RW 06 Kelurahan Maharatu yang beralamat di Jalan Ketapang Gang Amal Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Lamanya waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2016 sampai bulan Mei 2016.

2. Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari :

Tabel 1. Peserta Pelatihan

NO	PESERTA	JUMLAH
1	KSM Ketapang	6
2	KSM Amanah	6
3	Tokoh masyarakat	8
	TOTAL	20

3. Pengamatan Peserta

Dari proses pelatihan dinamika peserta berjalan dengan baik, terjadi komunikasi 2 (dua) arah yang bersifat dialogis dan kritis.

4. Topik dan Pemandu

Secara umum topik yang disampaikan pemandu sudah memenuhi kebutuhan pelatihan, namun untuk mengetahui seberapa jauh melihat topik dan pemandu dapat dilihat pada Evaluasi Topik dan Pemandu melalui beberapa aspek penilaian.

5. Penilaian Peserta

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan pelatihan, telah dilakukan evaluasi penilaian peserta. Nilai tersebut dihitung dari pelaksanaan *Pre Test* dan *Post Test* dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah soal bernilai benar}}{\text{Jumlah soal keseluruhan}} \times 100$$

Contoh perhitungan, Budi Susilo adalah Ketua KSM Ketapang, sebelum dilaksanakan pelatihan beliau mengikuti kegiatan *Pre Test*. Dari 13 (tiga belas) soal yang diberikan ternyata ada 6 (enam) soal yang dijawab benar dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai} = \frac{6}{13} \times 100 = 46$$

Dari hasil rekapitulasi diatas, peningkatan pemahaman substansi sebelum dan sesudah dilaksanakan sangat signifikan kenaikannya.

Gambar 1. Nilai *Pre Test* dan *Post Test* Peserta

Dari grafik nilai *Pre Test* dan *Post Test* peserta pada gambar 1 diperoleh bahwa nilai yang diperoleh peserta ada yang lebih tinggi dari peserta lainnya begitu juga sebaliknya ada peserta yang lebih rendah dari peserta lainnya. Selama kegiatan berlangsung kami mengamati bahwa peserta yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari peserta lainnya dikarenakan peserta tersebut terlihat aktif selama kegiatan berlangsung seperti bertanya setiap tidak memahami substansi yang disampaikan oleh tim pemandu serta memiliki wawasan yang luas terkait kegiatan infrastruktur. Peserta yang memiliki nilai lebih rendah dari peserta lainnya, berdasarkan hasil pengamatan tim pemandu mereka kurang aktif untuk bertanya, bahkan umpan balik yang diberikan oleh tim pemandu pun tidak direspon hal ini dikarenakan kemampuan masing-masing individu berbeda dalam memahami substansi yang diberikan melalui pelatihan yang hanya

diberikan pada jangka waktu yang belum maksimal.

6. Hasil Akhir Pelatihan

Score Penilaian :

Tidak Tampil	: 1 / 25
Sedang	: 2 / 50
Baik	: 3 / 75
Sangat Baik	: 4 / 100

Rekapitulasi hasil akhir pelatihan dari semua peserta dapat dilihat pada grafik dalam gambar 2 berikut.

Gambar 2. Rekapitulasi Hasil Akhir

Pembahasan

Kelurahan Maharatu termasuk salah satu permukiman yang masih perlu dilakukan perbaikan infrastruktur dasar. Masih banyak usulan prioritas kegiatan dari level RT/RW yang belum bisa direalisasikan padahal sudah masuk dalam Musrenbang. Masyarakat di level RT/RW juga memiliki pengetahuan yang terbatas terhadap berbagai program perbaikan infrastruktur dasar baik bersumber dari pemerintah maupun swasta.

Perbaikan infrastruktur dasar di permukiman dapat berjalan maksimal jika seimbang antara peran pemerintah dan masyarakat. Masyarakat seharusnya dapat menempatkan diri sebagai subjek atau pelaku utama untuk perbaikan infrastruktur di permukiman yaitu dengan penerapan slogan “dari oleh dan untuk masyarakat”. Masyarakat yang harus berperan aktif sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi dan memberikan fungsi pengawasan. Masyarakat harus mampu membuat sebuah perencanaan perbaikan yang nantinya akan diajukan kepada berbagai sumber dana yang ada baik itu bersumber dari pemerintah maupun swasta.

Dari hasil pelatihan yang diberikan diperoleh tingkat pemahaman masyarakat sebelumnya terkait infrastruktur permukiman masih sangat rendah yaitu sebesar 44% (empat puluh empat persen). Peserta kurang memahami bahkan cenderung baru mengetahui tentang materi yang diberikan. Namun dengan adanya proses *sharing* antara peserta memudahkan pemahaman substansi yang diberikan. Peran pelaku utama maupun tokoh kunci di masyarakat sangat diharapkan seperti peran Ketua RT dan Ketua RW yang berada di tingkat basis. Kemampuan Ketua RT/RW dalam menggerakkan dan memotivasi masyarakatnya

untuk perbaikan lingkungan berperan besar demi tujuan substansi yang diberikan. Tokoh masyarakat Kelurahan Maharatu sudah memotivasi seluruh RT di jajarannya untuk membuat identifikasi kegiatan perbaikan lingkungan. Namun masyarakat terkendala dalam membuat perencanaan teknis maupun pemasarannya.

Setelah melalui kegiatan pelatihan ini kemampuan peserta menyerap substansi yang diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) memperoleh nilai akhir Baik. Konsep pelatihan yang mengembangkan konsep komunikasi terbuka, peserta pelatihan bisa mempererat silaturahmi dalam rangka membuka jaringan informasi dan tukar pendapat terkait dengan masalah dan kendala serta upaya teknis atas keberhasilan perencanaan di kelurahan umumnya dan di tingkat basis khususnya. Setelah terbangunnya jaringan komunikasi yang terbuka antara basis (RT/RW) menjadi momentum untuk menjadikan KSM bisa bermitra dengan pihak luar baik pemerintah daerah maupun swasta. Produk yang bisa digunakan sebagai jembatan kemitraan tersebut adalah perencanaan teknis infrastruktur. Dalam kegiatan pelatihan ini telah dihasilkan produk berupa dokumen perencanaan teknis infrastruktur di Kelurahan Maharatu yang nantinya merupakan *outcome* bagi KSM dalam bermitra.

Mengingat pentingnya fungsi basis dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka upaya untuk menciptakan infrastruktur yang sehat dan layak perlu ditangani oleh semua pemangku kepentingan yaitu Ketua RT, Ketua RW, masyarakat, pihak Kelurahan serta peran strategis KSM sebagai komunitas pemerhati infrastruktur yang berkomitmen secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari semua tahapan kegiatan penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlunya peran serta perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar dalam melakukan perbaikan infrastruktur di permukiman.
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perencanaan teknis infrastruktur permukiman, dimana tingkat pemahaman masyarakat terkait infrastruktur permukiman sebelum adanya pelatihan masih sangat rendah yaitu sebesar 44% (empat puluh empat persen) dan setelah mengikuti kegiatan pelatihan menjadi 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Hasil akhir pelatihan untuk peserta dengan nilai 'Sangat Baik' sebesar 5%, nilai 'Baik' sebesar 75% nilai 'Sedang' 20% dan nilai 'Tidak Tampil' sebesar 0%.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun kultur pembelajaran

yang terorganisasi melalui komunitas belajar secara berkelanjutan

5. Produk yang digunakan sebagai jembatan kemitraan adalah perencanaan teknis infrastruktur. Dalam kegiatan penelitian ini telah dihasilkan produk dari hasil *OJT* berupa dokumen perencanaan teknis infrastruktur di Kelurahan Maharatu yang nantinya merupakan *outcome* bagi KSM dalam bermitra

SARAN

Dari semua data yang ada disarankan :

1. Diharapkan ada kontribusi lanjutan dari kalangan akademisi atau perguruan tinggi agar target utama yang diharapkan dapat terlaksana yaitu terpenuhi semua kebutuhan masyarakat untuk infrastruktur permukiman yang layak.
2. Ada sinergi dari semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya, 2008, *Persiapan dan Perencanaan Teknis Infrastruktur*, PNPM Mandiri Perkotaan
- Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya, 2011, *Strategi Pengembangan Kapasitas*, PNPM Mandiri Perkotaan
- Republik Indonesia, 2011, *Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, Lembaran Negara RI Tahun 2011, No 7, Sekretariat Negara RI
- Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Riau, 2015, *Kebijakan Nasional Program Peningkatan Kualitas Permukiman Direktorat Cipta Karya*, Satker PKP2B Riau
- Sistem Informasi Manajemen Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, 2016, *Kelengkapan Data Lokasi Kumuh Baseline 100-0-100*. Available from : http://sim.p2kp.org/p2kp/report/kelengkapan_data_kumuh.php?kode=14, Accessed : 2016, February 7
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2012, *Agenda Pembangunan Global Pasca 2015*, Sekretariat Wakil Presiden RI